BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini memberikan dampak yang baik dalam hal informasi, teknologi, serta komunikasi didalam sisi kehidupan masyarakat. Tak terkecuali perkembangan media sosial yang ada di Indonesia saat ini sangat menarik untuk dibahas terutama yang berkembang pesat pada media sosial berupa aplikasi instagram. Perkembangan instagram menjadi media baru bagi seseorang yang ingin memiliki popularitas, pada akhirnya mulai bermunculan sosok *public figure* pada media sosial Instagram atau mudahnya disebut dengan Selebritis Instagram dengan sebutan Pengiklan yang umumnya mendapat kesempatan untuk menjadi *Celebrity Endorser* karena jumlah pengikutnya atau *followers* yang sangat banyak.

Sehingga, pelaku usaha tertarik untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya tersebut menggunakan jasa pihak ketiga atau dalam hal ini didefinisikan sebagai *endorsement*, yang dilakukan dengan membentuk kerjasama melalui suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan pihak *endorsement*. Ada hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bisnis. Menurut Gilson & Berkman, pada dasarnya periklanan disini merupakan media komunikasi persuasive yang dirancang untuk menghasilkan respon dan membantu tercapainya objektifitas atau tujuan pemasaran.¹

Pihak *endorsement* tersebut dapat dikatakan selaku seorang yang mempromosikan produk atau jasa orang lain atau dapat disebut dengan *endorser* atau

¹Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 1, PT. Indeks, New Jersey, 2007, hal. 244-245

pengiklan.² Akun dari seorang *endorser* tersebut tentu menarik perhatian para pelaku usaha untuk mengiklankan produk dari pelaku usaha yang bersangkutan.³

Pada dasarnya *endorsement* ditandai dengan suatu promosi produk baik berupa suatu barang maupun jasa milik pelaku selaku pemilik usaha, usaha yang dilakukan oleh *endorser* atau pengiklan melalui perantara media sosial, baik berupa instagram, facebook, twitter, tik tok maupun akun media sosial lainnya yang mana akan dipromosikan oleh sipengiklan, dalam hal ini konsumen tertarik pada iklan yang diiklankan oleh pengiklan.⁴ Schiffman dan Kanuk mengemukakan bahwa dalam menggunakan seorang *celebrity endorser* penting bagi perusahaan untuk memperhatikan *celebrity credibility* atau kredibilitas dari selebriti tersebut dimata konsumen. Karena semakin baik kredibilitas seorang endorser maka konsumen bisa semakin yakin dengan produk atau jasa pengiklan. Jadi pemasang iklan juga harus sangat hati-hati dalam melakukan pemilihan terhadap endorser yang digunakan”.⁵

Perkembangan dunia bisnis selalu meningkat untuk menunjang pembangunan. Banyaknya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha membutuhkan adanya kepastian hukum dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terkait dengan bisnis. Perjanjian-perjanjian dapat dibuat oleh para pihak dapat saja dalam bentuk lisan atau tertulis, akan tetapi dalam bentuk tertulis lebih

²Sulistiawatio, Ni Luh Putuy Siska, et all. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar*. Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum 7, No. 4, 2019, hlm. 3.

³Fiona Kane, *Studi Analisis Korelasional Terhadap Celebrity Edorsement dan Minat Beli Konsumen di Kalangan Mahasiswa FISIP USU*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017, hal. 69

⁴Purwanto, Djoko *Korespondensi Bisnis Modern*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2017, hal. 3.

⁵Schiffman dan Kanuk, *Perilaku Konsumen*, Edisi ke Tujuh, PT. Indeks, Jakarta, 2007. hal. 135.

memberikan kepastian hukum.⁶ Tak terkecuali, pada perjanjian *endorsement* yang mana terjadi ikatan perjanjian antara pelaku usaha dengan *endorser* atau pengiklan.

Pada pokoknya pengaturan hukum positif di Indonesia pada (KUHPerdato) belum diatur secara spesifikasi tentang pengaturan *e-commerce*. Begitu juga dengan perjanjian *endorsement* yang secara khusus belum diatur dalam hukum positif di Indonesia khususnya KUHPerdato, sehingga segala ketentuannya mengikuti KUHPerdato baik berlaku secara umum atau universal.⁷ Pada dasarnya perjanjian *endorsement* ini didasari pada Pasal 1320 KUHPerdato sebagai dasar perjanjian mengemukakan bahwa empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸

Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Buku ke III KUHPerdato tentang

⁶Yetniwati, Elita Rahmi, dan Hartati, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, hal. 176.

⁷*Ibid.*, hal.9.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 225.

perikatan. Perjanjian merupakan suatu perikatan.⁹ Secara garis besar pada Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat pada dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pernyataan tersebut beranggapan bahwa terbentuknya suatu hak dan kewajiban antar kedua pihak yang saling mengikat diri guna dipenuhinya suatu kesepakatan. Dalam hal tersebut apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut sudah melanggar perjanjian dan dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Pihak tersebut dianggap lalai karena telah melanggar kesepakatan dari perjanjian dan telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Menurut R. Subekti, menyatakan bahwa:

Wanprestasi terdiri dari empat macam yaitu:

1. Tidak melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian;
2. Telah melaksanakan sesuatu tetapi tidak sesuai seperti apa yang dijanjikan;
3. Telah melaksanakan perjanjian, namun tidak sesuai jatuh tempo;
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh atau melanggar perjanjian.¹⁰

Perjanjian dalam *endorsement* yakni dimana pelaku usaha dan *endorse* atau pengiklan wajib mengikat diri dan saling memenuhi prestasi guna mencapai tujuan bersama. Bilamana salah satu pihak tidak mentaati sebagaimana yang sudah diuraikan dalam jenis wanprestasi diatas, maka pihak tersebut dianggap telah lalai/alpa. Merujuk perjanjian tersebut bahwa tidak sedikit pihak-pihak dalam suatu perjanjian yang mengalami permasalahan, salah satunya perjanjian *endorsement*. Tidak sedikit permasalahan yang kita temukan dalam perjanjian *e-commerce* yang melibatkan moral

⁹Dwi Suryahartat, *Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Kosumen di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.2, Nomor 2, Juni 2019.

¹⁰ R. Subekti, *Hukumn Perjanjian*, PT. Intermasa, Cetakan 23, Jakarta, 2010, hal. 45.

etika serta kejujuran diantara para pihak yang dimana pihak tersebut ialah *endorsre* atau pengiklan dan pelaku usaha. Permasalahan endorse dapat terletak pada suatu kepercayaan oleh para pihak dalam perjanjian *endorsement* tanpa adanya sebuah klausula baku di dalamnya. Hal ini berarti perjanjian tersebut hanyalah berdasar pada suatu kepercayaan para pihak melalui media online sosial media. Dari permasalahan diatas dapat banyak ditemukan suatu keadaan yang tidak terduga atau diinginkan terjadi oleh para pihak. Hal-hal tersebut dapat berupa perbuatan wanprestasi sampai pidana apabila salah satu pihak tidak memahami hukum yang berlaku.

Seperti halnya *endorser* atau pengiklan mempromosikan suatu barang yang mana terjadi dan tidak terjadi karena adanya suatu peristiwa tidak pasti yang merugikan konsumen. Maka dari itu konsumen dapat menggugat wanprestasi kepada pihak pelaku usaha karena sudah dianggap merugikan konsumen yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dengan UUPK. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen”. maksud dari Pasal tersebut ialah Perlindungan hukum tersebut harus mampu dalam melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh produsen/pelaku usaha.

Melihat dari hal tersebut, tidak sedikit terjadinya kasus konsumen yang menyalahkan bahkan sampai menggugat pengiklan atau *endoser* ketika konsumen menanggung kerugian karena tergiur dari promosi *endorser*. Merujuk dari penjelasan ini terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya yaitu adalah adanya

perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya kerugian yang timbul, serta hubungan klausul antara perbuatan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.¹¹ Hal tersebut berarti pemberi jasa *endorse* dapat dikatakan melanggar hukum dikarenakan tidak berhati-hati atau teliti dalam memastikan kebenaran produk yang di *endorse* baik dari manfaat maupun fungsinya yang berakibat kerugian bagi para konsumen.

Salah satu masalah yang timbul adalah ketidaksesuaian produk terkait dengan wujud, fungsi, manfaat dan lain sebagainya dari perjanjian yang telah disepakati. Faktor tersebutlah yang mengakibatkan kerugian dari konsumen karena telah tergiur oleh iklan yang menggunakan jasa *endorser*. Seperti halnya kasus yang ada di Kota Jambi, beberapa *endorser* atau disebut pengiklan terkait persoalan kasus selebgram beratasnamakan @putriandini dengan *followers* 400.000 (Empat Ratus Ribu), @Sherlywinskyahroni dengan *followers* 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu) dan @dianzuuaa_ dengan *followers* 10.000 (Sepuluh Ribu) Di 2021 mempromosikan produk arisan online beratasnamakan @Arisanamanahuntung dan @amanahuntungreal, Dalam permasalahan tersebut konsumen yang dirugikan menuntut pertanggungjawab kepada pihak *endorser*/pengiklan. Hal tersebut kemudian memberikan dampak kepada *followers endorser* atau selanjutnya disebut pengiklan jambi yang tergiur akan promosinya sehingga setelah diketahui produk tersebut tidak sesuai dengan komitmen yang diperjanjikan antara konsumen dan Pelaku usaha arisan

¹¹Raffles dan Rosmidah, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jurnal of Civil and Bussiness Law, Volume 1, Nomor 3, 2020, hal. 452-473.

online, para konsumen/ *followers* dari endoser atau pengiklan tersebut meminta ganti rugi yang mengakibatkan penurunan *followers* dan kerugian lainnya.

Dalam perkembangannya, perjanjian *endorsement* saat ini dapat menimbulkan masalah baik kepada pelaku usaha *arisan online* maupun pengiklan. *Endorser* atau pengiklan sebagai salah satu subjek hukum dalam perjanjian *endorsement* belum memiliki perlindungan hukum. Hal tersebut kemudian menyebabkan perlindungan hukum terhadap *endorser* atau pengiklan maupun pihak pelaku usaha pada saat ini hanya dapat ditinjau melalui bentuk dari perlindungan hukum yang telah dijabarkan oleh para ahli. Dalam melakukan perlindungan hukum tentunya diperlukan kepastian hukum guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap *endorser* yang mengalami kerugian financial.¹² Jika dalam hal ini pelaku usaha *arisan online* didugakan melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi terhadap suatu isi dari perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak sehingga merugikan konsumen, dan kemudian menuntut berupa pembayaran ganti kerugian kepada *endorser* yang mengakibatkan *endorser* ikut dirugikan akan kesalahan dari pelaku usaha yang mana pada dasarnya seharusnya bertanggungjawab sepenuhnya adalah pelaku usaha, karena hal ini pengiklan/*endorser* dirugikan karena tidak adanya perlindungan secara pasti mengatur mengenai perlindungan *endorser*/pengiklan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai praktik perlindungan hukum bagi

¹²Mifthahul Jannah. Raffles, dan Evalina Alissa, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jurnal unja Zaaken, Volume 2, Nomor 2, 2021, hal. 261.

endorser serta upaya penyelesaian terjadi wanprestasi yang dilakukan Pelaku usaha arisan online. Pembahasan ini peneliti tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap *Endorser* Dalam Perjanjian *Endorsment* di Kota Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *endorser* dalam perjanjian *endorsment* di Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian *endorser* yang mempromosikan produk bermasalah dalam perjanjian *endorsment* di Kota Jambi?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap perlindungan hukum terhadap *endorser* dalam perjanjian *endorsement* di Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi terhadap upaya penyelesaian yang dilakukan *endorser* yang mempromosikan produk bermasalah dalam perjanjian *endorsement* di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum sehingga memperkaya literatur di Indonesia dengan memberikan pengetahuan mengenai perjanjian dan pelaksanaan *endorsement* serta perlindungan hukum terhadap *endorser*.
- b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.

2. Secara Praktis, untuk diharapkan agar para pembaca dapat mengetahui perlindungan hukum *endorser* dalam perjanjian *endorsement* serta upaya penyelesaian bagi *endorser* yang mempromosikan produk bermasalah sesuai dalam perjanjian *endorsement* di Kota Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait antara lain sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹³

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: “Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.¹⁴

b. *Endorser*

Menurut Schimmelpfening menyatakan bahwa: “*Endorser* adalah actor, penghibur, yang terkenal, atau dikenal karena prestasinya dalam bidang-bidang yang berbeda dan direkrut oleh perusahaan dengan imbalan yang tertentu guna mengomunikasikan dari produk yang didukungnya”.¹⁵

Sedangkan menurut John McCormick menyatakan bahwa:

Endorser adalah seseorang yang mampu menarik lebih banyak perhatian konsumen pada iklan yang muncul dengan produk yang mereka dukung dan diselaraskan oleh citra endorser tersebut. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa endorser ialah seseorang yang dapat menarik simpatik dari calon konsumen karena memiliki prestasi dalam suatu bidang.¹⁶

c. Perjanjian *Endorsement*

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

¹⁵Shimp, Terence A., *Periklanan Promosi dan Aspen Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jilide I, Erlangga, Jakarta, 2007, hal.120.

¹⁶John McCormick, *Why Europe Matters For Britian: The Case for Remaining In*, Red Globe Press, English, 2016.

Pada Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian *endorsement* dapat dikatakan sebagai bentuk baru pada hukum perjanjian, sehingga perjanjian endorsement memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya. Asal kata *endorsement* adalah *endorce* yang memiliki arti memberi saran atau mendukung. *Endorsement* memiliki arti sebuah dukungan dari tindakan atau support sebagai bentuk persetujuan terhadap sesuatu.¹⁷

Berdasarkan Pasal tersebut, apabila dikaitkan dengan perjanjian endorsement, maka antara Pelaku usaha dan *endorser* wajib memenuhi persyaratan yang dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

1. Persetujuan atau kesepakatan antar pelaku usaha dan pengiklan/endorser.
Tujuan suatu perjanjian antara lain adalah agar para pihak yang terlibat di dalam kontrak dapat menyetujui isi yang telah disepakati dan tertuang pada kontrak tersebut. Hubungan hukum terkait dengan keterlibatan tersebut berarti perjanjian antara mereka menghasilkan sebuah kesepakatan. Hal ini juga berarti bahwa suatu hukum perjanjianm tidak boleh dibuat atas paksaan satu pihak;
2. Pihak pelaku usaha dan pemberi jasa endorse mampu untuk membuat suatu kesepakatan;

¹⁷Purwanto, Djoko, *Korespondensi Bisnis Modern.*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2017, hal, 3.

3. Terkait dengan ketentuan tertentu, meliputi apa saja yang akan dijanjikan dan obyek pada perjanjian dalam hak dan kewajiban yang diuraikan secara jelas;
4. Klausula yang diperbolehkan dalam hal tersebut berarti pada perjanjian tidak boleh bersebrangan dengan norma kesopanan, kesusilaan, ketertiban dan keamanan.

Pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian *endorsement* ini adalah pelaku usaha dan endoser/pengiklan yang mana pada dasarnya perjanjian ini dibuat sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, pada skripsi ini tidak dijelaskan secara rinci dan signifikan mengenai perjanjian dikarenakan perlindungan hukum mengenai pengiklan tidak ada dalam pengaturan atau undang-undang yang mengatur secara pasti.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada pokoknya menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk

¹⁸Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121.

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁹

2. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

3. Teori Kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰ Namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak. Sehingga muncul teori-teori untuk

¹⁹ Pemegang Paten, *Perlu Perlindungan Hukum*, Republika, 2004.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

menganalisis munculnya kesepakatan tersebut berlandaskan kepada kehendak atau pernyataan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

G. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi. Orisinalitas penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan topik yang mana pada skripsi Alya Nurul Naomiyasza.Z. dengan judul “Perjanjian Endorsment melalui Selebgram di Kota Jambi”. Yang mana pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan Endorsment di Kota Jambi, serta apa yang menjadi kendala dalam perjanjian endrosment di Kota Jambi dan penyelesaiannya. Dalam skripsi ini berbeda baik judul maupun pembahasannya yang mana pada skripsi ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap *Endorser* Dalam Perjanjian *Endorsment* di Kota Jambi serta Upaya Penyelesaian Endoser yang Mempromosikan Produk Bermasalah Dalam Perjanjian Endorsment di Kota Jambi.

H. Metode Penelitian

²¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu “Penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan”.²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian ini dilaksanakan. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Jambi, khususnya di Kota Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber penelitian hukum berupa data primer dan skunder dan data tersier.

a. Data Primer:

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek hukum dalam penelitian ini.

b. Data Skunder

Data Skunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer;

²²Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 43.

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, rancangan undang-undang, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai literatur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia.

4. Populasi dan sample penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penelitian pada skripsi ini terdapat 20 (Dua Puluh) dari Pengiklan / *Endoser* yang ada di Kota Jambi.

b. Sample

Menurut Sugiyono “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Kemudian dalam menentukan sampel dari

populasi yang akan diteliti, peneliti mengambil responden dari jumlah keseluruhan populasi pengiklan yang pernah memiliki masalah dengan pihak arisan online, Dalam hal ini penulis mendapatkan 3 (tiga) responden yang sesuai dengan kriteria dalam permasalahan penelitian ini. Dimana 3 (tiga) responden yaitu @putriandini, @Sherlywinsyahroni, dan @dianzuua_ pernah mendapatkan produk *endorse* bermasalah yang mana pada permasalahan skripsi ini Perjanjian endorsement antara pelaku usaha dan endoser yang tidaksesuai dengan yang dijanjikan diawal sehingga pelaksanaan perjanjian *endorsement* tidak berjalan dengan sesuai rencana.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi dokumen, Wawancara (*Interview*) dan Pengamatan (*Observasi*). Data dapat berupa dari primer dan data skunder.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terpimpin, dimana peneliti menyiapkan sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dengan cara mempelajari perjanjian yang terkait dengan permasalahan dan data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

c. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan cara mempergunakan bahan-bahan dan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik itu data primer maupun data sekunder disusun dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan mengelompokan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat rencana pembahasan dalam skripsi. Dengan ini diharapkan tergambar sistematika penulisan dari mulai bab pendahuluan hingga penutup, rencana susunan skripsi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ENDORSER, PERJANJIAN *ENDORSEMENT*.

Tinjauan Pustaka berisikan konsep pemikiran tentang, Undang-Undang Perlindungan hukum, *Endorser*, serta Perjanjian *Endorsement*.

BAB III : PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ENDORSER DALAM PERJANJIAN *ENDORSEMENT* DI KOTA JAMBI.

Pada bab pembahasan ini, dibahas mengenai Bagaimana Perlindungan hukum terhadap *endorser* dalam Perjanjian *endorsement* di Kota Jambi, serta Bagaimana upaya penyelesaian *endorser* yang mempromosikan produk bermasalah dalam perjanjian *endorsement* di Kota Jambi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab Penutup ini besisikan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab III. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.